



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELESTARIAN MONUMEN BENCANA SEBAGAI CAGAR BUDAYA PADA SITUS KAPAL PLTD APUNG DI BANDA ACEH

Community Perception for Preservation of Disaster Monumen as Heritage at the Site of PLTD Apung Ship in Banda Aceh

Zya Dyena Meutia

Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains & Teknologi UIN AR-Raniry (zya.meutia@ar-raniry.ac.id)

ABSTRAK

Monumen bencana adalah objek, bangunan atau tempat yang berfungsi untuk mengenang sebuah peristiwa yang dapat diteruskan dari generasi ke generasi sebagai pembelajaran dan pengingat. Penelitian ini mengambil studi kasus di situs monumen bencana Kapal PLTD Apung, Banda Aceh sebagai sebuah situs pengingat bencana maha dahsyat tsunami, yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan wisata sejarah dan tsunami. Namun berdasarkan observasi dan juga dukungan literatur, diketahui masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian dan partisipasi untuk menentukan situs sebagai cagar budaya. Selama ini, banyak masyarakat hanya sebagai pengunjung dan belum mengambil peran dalam program-program pelestarian yang mengarah pada pertimbangan untuk menetapkan situs tersebut sebagai cagar budaya. Dibutuhkan identifikasi persepsi dan nilai-nilai signifikan yang dipahami masyarakat dalam melestarikan monumen bencana situs Kapal PLTD Apung Banda Aceh. Studi ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dimana subjek sebagai instrumen utama berdasarkan wawancara mendalam dan observasi serta didukung data-data kuesioner kepada informan. Berdasarkan temuan penelitian pentingnya memahami sudut pandang masyarakat dalam melestarikan serta hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai sejarah, sosial, budaya, memori, religius, ketangguhan, dan ekonomi menjadi nilai-nilai signifikan dalam pertimbangan pelestarian monumen bencana situs Kapal PLTD Apung sebagai cagar budaya. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi berupa melestarikan kawasan hasil bencana tsunami sebagai cagar budaya. Penelitian juga memberikan rekomendasi untuk arsitek dan perencana kota dalam menyusun kebijakan perencanaan monumen bencana situs kapal PLTD Apung sebagai cagar budaya.

Kata-kata kunci: Cagar Budaya, Kapal PLTD Apung, Monumen Bencana, Pelestarian

ABSTRACT

Disaster monument are objects, buildings or places that serve to commemorate an event that can be passed on from generation to generation as a learning and reminder. This study takes a case study at the PLTD Apung ship disaster monumen site, Banda Aceh as a reminder site for the great tsunami disaster that has been designated by the government as a historical and tsunami tourism area. However, based on observations and literature support, there is still a lack of community involvement in conservation and participation in determining the site as a cultural heritage. So far, many people are only visitors and have not taken part in conservation programs that lead to the consideration of establishing the site as a cultural heritage. It is necessary to identify significant perceptions and values that are understood by the community in preserving the disaster monumen of the Banda Aceh Floating PLTD Ship site. This study uses a descriptive qualitative method approach where the subject as the main instrument is based on in-depth interviews and observations and is supported by questionnaire data to informants. Based on the research findings, it is important to understand the community's point of view in preserving and the results of the study show that the values of history, social, culture, memory, religious, toughness, and economy are significant values in the consideration of preserving disaster monumens at the PLTD Apung Ship site as a cultural heritage. It is hoped that this research can contribute in the form of preserving the area resulting from the tsunami as a cultural heritage. The research also provides recommendations for architects and urban planners in formulating policies for planning disaster monuments for the Apung PLTD ship site as a cultural heritage.

Keywords: Disaster Monument, Heritage, Preservation, PLTD Apung Ship,

Article History

Diterima (Received) : 24-06-2022
Diperbaiki (Revised) : 29-06-2022
Diterima (Accepted) : 30-06-2022



1. PENDAHULUAN

Monumen adalah simbol dan tempat-tempat di mana adanya tindakan peringatan, penghormatan, pengorbanan, kesedihan, kehilangan, kerugian dan rasa cinta tanah air dengan nilai-nilai sejarah, budaya dan sosial yang melekat pada tempat tersebut (Breglia, 2006; Logan dan Reeves, 2008). Monumen bencana juga menyerupai lokalitas yang didedikasikan untuk mengingat dengan tujuan interpretasi kolektif memori masa lalu, yang tidak hanya berdampak pada bagaimana orang-orang mengingatnya dan menafsirkan masa lalu, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membangun masa depan (Stone, 2018). Secara khusus, hal ini terlihat di Banda Aceh dimana situs komemorasi (peringatan) tsunami seperti *kapal PLTD Apung* telah dilegitimasi oleh pemerintah sebagai situs resmi wisatawan namun belum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya (Meutia dkk, 2021)

Pelestarian sendiri merupakan usaha dinamis untuk menjaga keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya (UU RI CB 11/2010). Sifat Cagar Budaya: Terbatas (*finite*); tak terbarui (*nonrenewable*); dan mudah rapuh (*vulnerable/fragile*). Indonesia berada di daerah rawan bencana, karena faktor geografi, geologi (lempeng tektonik) dan demografi sehingga menyebabkan ancaman bagi cagar budaya sekaligus menghasilkan lanskap pascabencana yang mengandung reliq peninggalan. Lanskap pascabencana harus dilestarikan dengan merencanakan suatu kawasan yang menjadi pengingat bagi setiap orang akan peristiwa tsunami tersebut (Samuel, 2019).

Pentingnya Cagar Budaya seharusnya tidak hanya terletak pada aspek material (bentuk), tetapi sebagian besar (jika tidak semua) pada aspek non material (fungsi, kegiatan dan *sense of place*). Selain menggunakan pendekatan preservasi (pelestarian) dan *adaptive reuse* (penggunaan kembali), perlu mempertimbangkan pendekatan *adaptive reform* (perubahan bentuk, namun mempertahankan fungsi) untuk bangunan-bangunan pascabencana yang sudah tidak mungkin dipertahankan keaslian bentuknya (biaya, waktu, urgensi lain dalam rehab rekon) dan tetap mempertahankan bangunan ini dalam situs cagar budaya *tangible values* (bukan hanya mengakui *intangible values*). Oleh karenanya, diperlukan integrasi pelestarian cagar budaya dalam peraturan *Urban Planning* (Tata Kota/ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR), sehingga Pemerintah daerah dapat dengan mudah mengontrol fungsi dan perubahan cagar budaya (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2017).

Pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya pelestarian untuk mengenang tragedi bencana maha dahsyat tsunami 2004 silam dengan melakukan konservasi pada objek-objek monumen bencana tsunami. Pemerintah daerah Aceh juga telah mengambil kebijakan-kebijakan, yaitu dengan mendirikan sebuah museum internasional, tiga situs dan enam monumen tsunami. Salah satu kawasan telah dikembangkan menjadi monumen bencana tsunami yaitu kawasan Kapal PLTD Apung. Monumen bencana Kapal PLTD Apung dilestarikan sebagai pengingat peristiwa tsunami dan berdiri di area permukiman warga. Namun berdasarkan observasi dan penelusuran penulis bahwa masih minimnya keterlibatan masyarakat secara komprehensif dalam melestarikan monumen bencana tersebut. Padahal perlunya masyarakat dilibatkan dalam program-program pelestarian demi keberlanjutan monumen bencana tersebut.

Studi ini ingin menjelaskan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melestarikan warisan sejarah tsunami berupa situs monumen bencana Kapal PLTD Apung yang tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemerintah saja namun juga masyarakat secara luas mulai dari pengunjung, masyarakat setempat, ahli dan juga penyintas tsunami itu sendiri. Pelestarian bukan hanya fisik semata namun yang lebih penting juga tentang nilai dan makna dari monumen bencana yang akan dilestarikan perlu merefleksikan pandangan dan interpretasi masyarakat sebagai pengguna atau pemilik (Martokusumo, 2015). Oleh karena itu, pelestarian monumen bencana perlu melibatkan suara masyarakat dalam pelestariannya.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini bersifat kualitatif deskriptif dan berlangsung selama 3 minggu menggunakan beberapa subjek penelitian seperti Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, masyarakat lokal, pengunjung, *tour guide* dan tim manajemen dari situs monumen bencana kapal PLTD Apung. Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap 20 informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan terkait bencana tsunami dan mengetahui keberadaan situs monumen bencana kapal PLTD Apung. Validasi data dilakukan dengan mengonfirmasi kepada sejumlah pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang Kapal PLTD Apung seperti penjaga situs, ahli dan juga keluarga



penyintas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dan didukung oleh instrumen tambahan yaitu foto survey, observasi, kuesioner dan pertanyaan wawancara. Reduksi data, display data dan verifikasi diterapkan untuk menganalisis data yang telah didapatkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Situs kapal PLTD Apung Banda Aceh

Penelitian ini dilakukan di salah satu situs monumen tsunami yaitu kapal PLTD Apung atau sering dikenal dengan "Kapal Apung" milik PLN Kota Banda Aceh yang merupakan kapal generator listrik. Kapal tersebut sekarang sudah menjadi lokasi pariwisata tsunami Aceh. Luas kapal ini mencapai 1.900 meter persegi dengan panjang sekitar 63 meter. Dahulunya terdapat mesin pembangkit listrik dengan daya sekitar 10,5 megawatt yang ada di dalam kapal. Namun pada tahun 2010 sudah dipindahkan. Pada saat ini, Kapal Apung dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sebelum bencana tsunami melanda kapal berbobot 2.600 ton ini berada di pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue, setelah terjadinya bencana tsunami kapal ini berada di Gampong Punge Blang Cut, Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Pada hari Minggu 26 Desember 2004 sekitar pukul 8.45 WIB, gelombang tsunami setinggi 9 m menyeret kapal ini 2,4 km ke daratan. Dahulunya kapal ini merupakan pemberian kepada pemerintah Aceh pada masa konflik antara pemerintah dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) berlangsung. Kapal Apung telah direnovasi pada tahun 2012-2013. Saat ini para wisatawan dapat naik ke atas mengunjungi kapal dan disekitaran kawasan kapal yang sudah dibangun monumen, dua menara, jalan setapak, dan air mancur.

Saksi mata menginformasikan bahwa pada saat kejadian tsunami, kapal PLTD Apung sedang berlabuh di Pelabuhan Ulee Lheue yang jaraknya lebih kurang 5 Km dari gampong Punge Blang Cut. Pada tanggal 26 Desember 2004 tepatnya pada hari minggu, Kapal PLTD Apung sedang berlabuh di Pelabuhan Ulee Lheue, dan baru saja diisi bahan bakar penuh. Awak kapal yang bertugas saat itu berjumlah 12 orang. Sekitar pukul 07.30 terjadi gempa, yang diperkirakan memiliki kekuatan sekitar 9 skala Richter. Setelah sekitar 10 menit kemudian air laut surut ke arah laut dengan jarak lebih kurang 1 km dari garis pantai, dan posisi kapal PLTD menjadi miring ke arah (dalam) pelabuhan. Setelah datang gelombang pertama kapal terhempas ke arah Lamjame, lalu ketika datang gelombang kedua

kapal Apung ini mendarat di atas permukiman warga di Punge, Kecamatan Meuraxa.



Gambar 1 : Situs Kapal PLTD Apung
(Sumber : Dokumentasi Penulis)

3.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Monumen Bencana Kapal PLTD Apung Banda Aceh

Wawancara penulis dengan informan kepala pengurus monumen ini menyampaikan bahwa hanya ada 1 orang yang selamat di atas kapal dan hingga saat ini penulis belum berhasil mewawancarai penyintas di kapal ini karena tidak ada yang mengetahui keberadaan penyintas tersebut setelah pindah dari Aceh. Keberadaan kapal PLTD kini telah diakui dan disepakati oleh pemerintah untuk menjadi destinasi wisata paling populer di Aceh yang menjadi monumen bencana untuk mengenang terjangan tsunami.

Keberadaan monumen bencana memiliki fungsi sosial budaya bagi masyarakat lokal. Fungsi sosial budaya yang dimaksud adalah memberikan manfaat sosial dengan adanya komemorasi/pengingat berupa praktik-praktik memorial, kegiatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Hal ini dapat ditinjau dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di monumen bencana dan tanggapan masyarakat terhadap keberadaan monumen bencana yang ada disekelilingnya seperti adanya aktivitas penjualan souvenir dan juga masyarakat yang bisa berjualan disekitar situs. Monumen sebagai cagar budaya menjadi salah satu hal yang penting terhadap suatu kejadian. Monumen bencana yang dijadikan cagar budaya dapat digambarkan sebagai sebuah simbol dan identitas agar masyarakat dapat mengetahui kejadian ataupun momentum tertentu sehingga dapat terus terjaga kelestariannya (Dewi, 2017).

Monumen dan museum bencana merupakan sarana atau media untuk mengingat. Pada saat ini, museum tidak hanya sebagai tempat untuk visualisasi alam, seni, dan budaya saja. Namun



menjadi sarana untuk mengingat kembali suatu bencana atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai monumen atau museum bencana yang dibangun atau berupa relik peninggalan pascabencana untuk mengingat peristiwa yang telah terjadi. Kapal tsunami ini sekarang telah menjadi monumen sebagai bukti bisu dari bencana tsunami di Aceh, sehingga difungsikan sebagai salah satu tempat wisata di pusat kota Banda Aceh.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap informan memiliki pengalaman, nilai dan makna yang berbeda-beda, baik langsung maupun tidak langsung akibat bencana tsunami 2004 silam. Setiap informan memiliki rasa sedih akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana dan kehilangan anggota keluarga. Hal ini seperti yang dirasakan oleh informan, seorang mahasiswa. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan korban tsunami, namun ada beberapa saudaranya yang meninggal dunia karena bencana tsunami, dan juga terkena dampak dari bencana tersebut. Sedangkan informan yang merasakan langsung bencana tsunami memiliki kisah penuh dengan rasa sedih, terpisah dengan keluarga saat bencana tsunami, merasakan terbawa arus gelombang tsunami, kesedihan mencari keluarga, hingga kehilangan anggota keluarga yang tidak ditemukan jasadnya sampai saat ini. Bahkan, ada informan yang masih mengalami dan merasakan trauma sampai saat ini dan tidak ingin diwawancarai.

Gambar 2 menunjukkan kegiatan penulis mewawancarai salah satu korban tsunami yang juga tinggal di sekitar Kawasan situs monumen bencana Kapal PLTD Apung. Informan menyatakan memiliki memori buruk, kesedihan dan trauma akibat bencana tsunami dan menyaksikan bagaimana kapal PLTD Apung tersebut menghantam permukiman warga. Namun dibalik peristiwa tersebut, terdapat nilai religius yang kuat untuk berserah diri, ikhlas dan tawakkal terhadap ketentuan dari yang Maha Kuasa. Hal senada disampaikan oleh tim manajemen Kapal PLTD Apung yang juga sebagai penyintas. Situs monumen bencana masih menjadi objek wisata tsunami yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya karena belum memenuhi kriteria usia 50 tahun merujuk kepada UU RI CB 11/2010. Padahal situs monumen bencana ini telah memiliki nilai-nilai signifikan yang dapat dilestarikan menjadi objek cagar budaya.



Gambar 2: Kegiatan Wawancara Penulis Bersama Beberapa Warga di Lokasi Kawasan Pascabencana

(Sumber : Dokumentasi Penulis)

3.3 Nilai-nilai Signifikan Sebagai Dasar Pelestarian Situs Monumen Bencana

Nilai adalah sesuatu yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk dan menjadi rujukan dalam bertindak. Nilai melekat pada sebuah objek atau situs monumen bencana. Dalam pelestarian, pertimbangan nilai-nilai signifikan dibutuhkan untuk menentukan sebuah objek sebagai cagar budaya yang perlu dilestarikan atau tidak dilestarikan. Terdapat empat nilai dalam Piagam Burra Charter yang menjadi dasar untuk menetapkan dan melestarikan sebuah objek jika mengandung nilai sosial budaya, nilai sejarah, nilai religius dan nilai ekonomi (Martokusumo, 2015). Merujuk pada hal tersebut maka penulis melakukan wawancara dan juga pembagian kuesioner pada informan untuk menanyakan pandangan nilai-nilai dan makna yang mereka rasakan pada situs monumen bencana tsunami Kapal LPTD Apung Banda Aceh.

Dalam Tabel 1 terdapat sejumlah nilai-nilai lainnya yang tidak terdapat pada nilai-nilai dasar pelestarian yang juga sangat penting bagi pelestarian monumen ini yaitu nilai memori, dan nilai ketangguhan yang mendapat persentase 30 % dan 7 % di mana nilai-nilai tersebut sangat penting dalam mengenang tragedi tsunami. Informan juga menyampaikan bahwa nilai memori cenderung mengingat peristiwa kelam yang menimbulkan kesedihan dan trauma karena kehilangan keluarga yang dicintai. Namun nilai ketangguhan juga muncul dari pandangan masyarakat karena dianggap penting melekat pada situs monumen bencana tsunami yaitu Kapal PLTD Apung Banda Aceh.

**Tabel 1: Nilai-nilai Signifikansi Paling Penting bagi Masyarakat (Meutia, 2021)**

No.	Nilai-nilai Signifikansi	Setuju	Kurang Setuju	Tidak tahu
1	Religius	30 %	5 %	-
2	Memori	30 %	10 %	-
3	Sejarah	9 %	17 %	10 %
4	Ekonomi	9 %	22 %	37 %
5	Ketangguhan	7 %	25 %	33 %
6	Sosial	5 %	11 %	20 %
7	Budaya	10 %	10 %	-
8	Total	100 %	100 %	100 %

3.4 Pelestarian Situs Monumen Kapal PLTD Apung

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa pelestarian masih dilakukan sepihak dan masing-masing baik oleh pemerintah maupun masyarakat lokal. Pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam hal ini penyintas untuk ikut dalam diskusi publik atau FGD dalam konteks penetapan dan pelestarian cagar budaya tersebut. Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan bahwa kawasan pascabencana tsunami di kecamatan Jayabaru yang mengandung situs-situs peninggalan bencana tsunami belum seluruhnya ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya namun menurut pandangan masyarakat sepakat menyatakan bahwa situs-situs tersebut memiliki nilai-nilai signifikan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pelestarian monumen bencana situs Kapal PLTD Apung sebagai cagar budaya demi keberlanjutannya.

Dari hasil analisis dan pengamatan di lapangan menunjukkan berbagai pemangku kepentingan belum bersungguh-sungguh untuk melestarikan, menjaga, menyelamatkan situs dan cagar budaya pascabencana tsunami karena orientasi lebih kepada nilai ekonomi melalui pariwisata tsunami semata. Belum gencarnya aksi pemerintah dalam memberdayakan situs kepada masyarakat luas sebagai sebuah museum pendidikan dan sejarah yang merupakan bukti autentik yang patut dijaga kelestariannya. Tetapi upaya pemerintah menuju pada penetapan dan pelestarian kawasan pascabencana tsunami sebagai kawasan cagar budaya telah ditunjukkan oleh pemerintah sudah membuat qanun cagar budaya dan disahkan pada tahun 2020 untuk menyelamatkan dan melestarikan situs-situs sejarah yang sangat berharga bagi kota

Banda Aceh. Tabel 1 merupakan hasil wawancara dari pandangan *stakeholder* terhadap nilai-nilai yang melekat sebagai pertimbangan penetapan cagar budaya.

Hasil analisis dari wawancara dengan beberapa informan terkait dan juga pengamatan telah menunjukkan bahwa masyarakat Banda Aceh yang datang ke monumen bencana ini memiliki alasan tertentu, seperti halnya mengantar kerabat, teman atau tamu dari luar kota, urusan pekerjaan ataupun mengisi waktu luang. Keberadaan monumen bencana berupa Kapal PLTD Apung yang berada di tengah-tengah masyarakat, menjadikan monumen bencana tersebut menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari cara masyarakat memperkenalkan monumen tersebut kepada para pengunjung, tamu atau teman berasal dari luar Aceh. Masyarakat lokal biasanya mengajak sanak saudara dan teman dari luar kota untuk memperkenalkan monumen bencana situs Kapal PLTD Apung di kota Banda Aceh.

Gambar 3 di bawah menunjukkan situs lanskap monumen bencana Kapal PLTD Apung yang sudah ditata dengan baik oleh pemerintah sebagai objek wisata tsunami. Warna dari kapal dipertahankan sesuai warna kapal saat peristiwa untuk menjaga keaslian dan keutuhannya. Lansekap disekitar kapal di desain seperti ombak di mana pengunjung juga bisa menikmati sekaligus mengingat dan merenungi peristiwa bencana maha dahsyat tsunami 2004 silam. Bekas reruntuhan rumah disekitar kapal juga dijaga dan dipertahankan sehingga dalam kawasan situs ini terdapat beberapa objek monumen bencana pengingat tsunami berupa situs kapal, prasasti nama-nama korban dan reruntuhan rumah.



Gambar 3: Lanskap Situs Monumen Bencana Kapal PLTD Apung
(Sumber : Dokumentasi Penulis)

4. KESIMPULAN

Monumen yang mengandung nilai sejarah menyimpan beberapa poin berupa pembelajaran terhadap apa yang telah terjadi di masa lalu. Monumen bencana tsunami berupa situs Kapal PLTD Apung memiliki fungsi wisata edukasi yang memiliki nilai-nilai signifikan berupa nilai sejarah, memori, religius, ketangguhan, sosial, budaya dan ekonomi yang dapat menjadi pertimbangan dalam melestarikan situs sebagai cagar budaya. Adanya monumen tersebut membuat masyarakat Banda Aceh merasa mereka mendapat informasi-informasi yang bermanfaat. Adanya sebuah monumen akan menjadi media yang harus diketahui oleh generasi ke depannya, membaca dan mengingat peristiwa yang pernah menimpa Aceh dan sekitarnya, serta dapat menjadi pembelajaran agar kedepannya harus lebih berhati-hati. Bencana gempa dan tsunami merupakan salah satu bencana maha dahsyat yang menjadi sejarah Aceh yang tidak pernah dapat dilupakan bagi seluruh masyarakat Banda Aceh, baik yang mengalaminya atau pun tidak.

Membangun kesadaran dan motivasi masyarakat menuju budaya pelestarian situs-situs monumen bencana yang juga sebagai kesiap-siagaan bencana bukanlah berarti mengharapkan bencana akan menimpa kembali. Sebaliknya, dengan mengamati berbagai fenomena alam yang terjadi selama ini, maka telah menjadi sebuah indikasi bahwa bencana-bencana tersebut sepertinya akan terus kita hadapi di era penuh ketidakpastian ini, dimana dan bagaimana bencana tersebut akan terjadi.

Sehingga, ada pelajaran berharga yang bisa dipelajari di sini untuk masa depan yaitu tentang pentingnya melibatkan masyarakat lokal secara lebih serius sejak awal proses perencanaan pelestarian situs, monumen, monumen atau sebagai alternatif untuk menggunakan kawasan perkotaan sebagai model bagaimana melembagakan langkah-langkah inklusi yang memadai dalam konteks keberlanjutan cagar budaya dari peristiwa kelam. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi berupa melestarikan kawasan hasil bencana tsunami sebagai cagar budaya. Penelitian juga memberikan rekomendasi untuk arsitek dan perencana kota dalam menyusun kebijakan perencanaan monumen bencana situs kapal PLTD Apung sebagai cagar budaya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Breglia, L. (2006). *Monumental Ambivalence: The Politics of Heritage*. University of Texas Press, Austin.
- Dewi, C. (2017). *Iconic architectural heritage conservation in post disaster Context*, Disertasi Program Doktor, University of Melbourne, Routledge.
- Logan, W., dan K. Reeves. (2008). *Places of pain and shame: Dealing with 'difficult heritage'*. London: Routledge.
- Meutia, Z. D. , Rosyidie, A. , Zulkaidi, D. , dan Maryati, S. (2021). *Perencanaan Dark Heritage Bagi Masyarakat di Kawasan Pasca Bencana Tsunami Banda Aceh, Indonesia*, *Jurnal*



- Nasional TATALOKA*, (Vol 23, No 4 (2021): Volume 23 No. 4, November 2021), - , DOI: <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.4.511-523>
- Martokusumo, W. (2015). *Arsitektur dan pelestarian: Menuju pengelolaan berkelanjutan bangunan dan lingkungan cagar budaya*, Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, 25 September, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2017): *Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Meuraxa*. Banda Aceh.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Benda Cagar Budaya*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Stone, P. dan Sharpley, R. (2018). *Consuming dark tourism: a thanatological perspective*, *Annals of Tourism Research*, 35(2), 574–595. DOI: 10.1016/j.annals.2008.02.003.
- Samuels A. (2019). *After the Tsunami: Disaster Narratives and the Remaking of Everyday Life in Aceh*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Kutipan Artikel

Meutia, Z.D. (2022), *Persepsi Masyarakat terhadap Pelestarian Monumen Bencana sebagai Cagar Budaya pada Situs Kapal PLTD Apung di Banda Aceh*, *Rumoh*, Vol: 12, No: 1, Hal: 38-44: Juni. DOI: <http://doi.org/10.37598/rumoh.v12i1.194>